



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURDIN RAHMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **105891**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.313.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 581 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 733 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000
3. Tanah Seluas 4732 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. Tanah Seluas 9648 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
5. Tanah Seluas 829 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **80.000.000**

1. MOBIL, HARDTOP HARDTOP Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	77.595.235
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.483.595.235
III. HUTANG	Rp.	71.665.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.411.930.235

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.